

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pegawai merupakan unsur yang terpenting dan menentukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan, karena pegawai negeri sipil merupakan unsur pelaksanaan / penyelenggara tugas – tugas / pekerjaan guna pencapaian tujuan tersebut.

Kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan karena pegawai negeri merupakan unsur aparatur Negara yang menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari keikutsertaan pegawai negeri. Kedudukan dan peranannya yang penting menyebabkan pegawai negeri sipil senantiasa dituntut supaya memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh dalam menjalankan tugas – tugasnya dan memusatkan seluruh perhatian serta mengerahkan segala daya dan tenaga secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ratna (2014) Pengawasan tidak akan dapat di laksanakan apabila tidak atau belum ada penentuan tujuan yang akan dicapainya. Jelaslah kiranya pengawasan sangat menentukan peranannya dalam usaha pencapaian tujuan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena pimpinan yang baik adalah seseorang yang memberikan bimbingan kepada bawahannya dengan ikhlas agar tidak lagi

mengulangi kesalahan yang sama. Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga lebih bersifat mencegah dibanding dengan tindakan pengawasan setelah terjadi penyimpangan.

Ni Luh Made Herawati (2016) Pengawasan pimpinan menjadi salah satu faktor penunjang dalam mencapai kinerja pegawai. Perkembangan pengawasan melekat (waskat) menjadi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menempatkan pimpinan organisasi sebagai penggerak dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Lima unsur yang ada dalam SPIP, antara lain lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan mendorong pimpinan organisasi melakukan pergeseran pengawasan dari *hard control* ke *soft control*.

Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas dari aparatur negara yang dimiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, dan disiplin, serta kewibawaan, hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa unsur yang terpenting dalam meningkatkan kualitas dari aparatur negara adalah dengan meningkatkan disiplin kerja bagi aparatur negara di dalam setiap pelaksanaan tugas.

Disiplin harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah baik yang berada di tingkat atas maupun yang berada di tingkat bawah. Disiplin yang dimiliki oleh aparat tingkat pusat juga harus dimiliki oleh aparat di tingkat daerah baik itu

Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat diharapkan saling menunjang dalam menciptakan disiplin nasional. Disiplin juga harus dimiliki oleh aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan. Aparatur pemerintah kecamatan sebagai aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus memiliki disiplin yang tinggi dihubungkan dengan pekerjaan, kerjasama dan pelayanan terhadap masyarakat serta dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan.

Kartasmita (dalam Dymas Bangkit Satriya, 2013) menyatakan bahwa Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan kecamatan perlu dilakukan pengembangan sumber daya aparatur. Manusia adalah sumber daya pembangunan yang paling utama di antara sumber daya yang lain yang harus terus-menerus dibangun kemampuan dan kekuatan sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus dan terus dilaksanakan mengingat pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang.

Peningkatan disiplin sangat menentukan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu camat berusaha untuk meningkatkan disiplin kerja para pegawai agar tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Pembinaan disiplin pegawai tidaklah semudah yang dibayangkan. Para pegawai negeri sipil terdiri dari berbagai watak dan karakter yang berbeda sehingga perilaku dan sikap seorang pegawai tidaklah selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang ada dan pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil pekerjaan dan prestasi kerja pegawai.

Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas Pemerintahan Kecamatan Medan

Labuhan, dalam hal ini peranan Camat sebagai pucuk pimpinan ditingkat kecamatan, juga menghadapi kendala dalam hal upaya mewujudkan disiplin pegawai. Kendala menurunnya disiplin pegawai Kecamatan Medan Labuhan hal itu dibuktikan dengan tidak adanya pegawai yang melayani masyarakat seperti seharusnya. Fenomena-fenomena permasalahan para pegawai di Kantor Camat Medan Labuhan yang berhubungan dengan disiplin pegawai diantaranya masih ada pegawai yang tidak disiplin dalam waktu kerja, masih ada pegawai yang terlambat memasuki jam kerja, masih ada pegawai yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar dan waktu yang telah ditentukan dan masih terjadi pemakaian waktu luang dalam bekerja yang berlebihan. Masalah disiplin tersebut sangat mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Oleh karena itu, peranan camat dalam pengawasan disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Medan Labuhan sangat diperlukan untuk mengawasi disiplin pegawai Kecamatan Medan Labuhan.

Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Peranan Camat Dalam Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil studi pada Kantor Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti memfokuskan masalah penelitian pada :

1. Bagaimanakah peranan Camat dalam pengawasan disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Medan Labuhan ?

2. Bagaimanakah tingkat disiplin pegawai negeri sipil yang ada di kantor Kecamatan Medan Labuhan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Camat dalam pengawasan disiplin pegawai negeri sipil di kantor Kecamatan Medan Labuhan.
2. Untuk mengetahui tingkat disiplin pegawai negeri sipil yang ada di kantor Kecamatan Medan Labuhan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Secara Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang peranan pengawasan Camat dalam meningkatkan disiplin pegawai kecamatan.
- b. Agar dapat lebih jelas mengetahui bagaimana peranan pengawasan Camat di dalam meningkatkan disiplin perangkat Kecamatan.

#### **1.4.2. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini berguna :

- a. Untuk memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan teori dengan praktek guna kepentingan praktis dalam mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas dimasa yang akan datang.

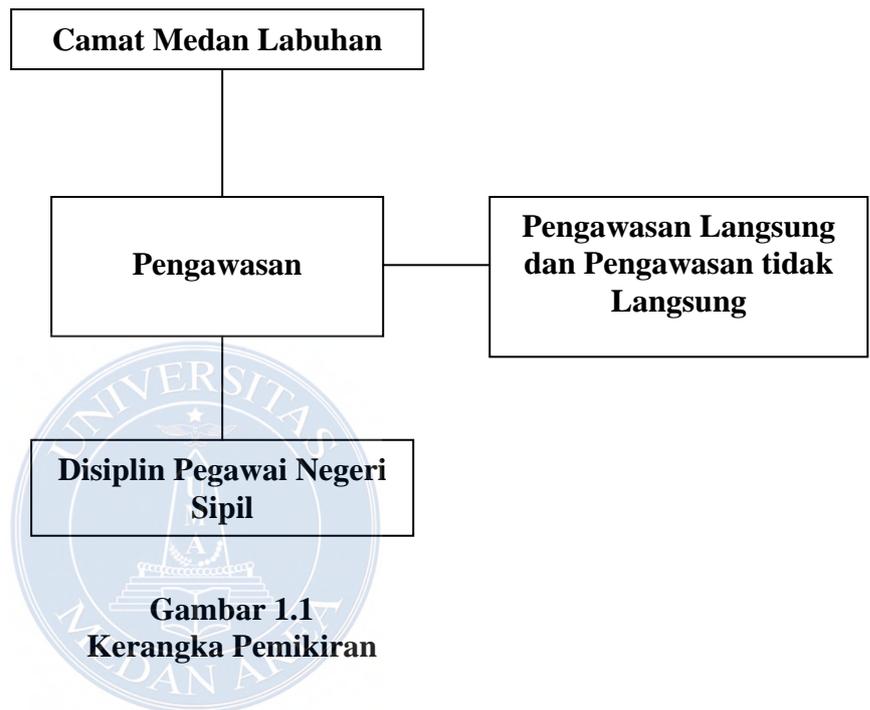
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya di Kecamatan mengenai upaya-upaya yang dilakukan Camat dalam meningkatkan disiplin perangkat kecamatan.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Pada tingkat kecamatan, pemerintahan dikendalikan oleh seorang camat yang mempunyai peran sesuai dengan jabatan. Seorang pimpinan harus menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya di dalam organisasi. Dimana kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin memengaruhi perilaku bawahan agar bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana. Disiplin kerja berhubungan erat dengan semangat dan motivasi serta moral kerja. Disiplin yang baik pada hakekatnya tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Demikian pula halnya dengan disiplin akan mudah ditegakkan bilamana timbul dari kesadaran tiap insan untuk selalu bertindak taat, patuh, teratur, tertib bukan karena tekanan atau paksaan dari pihak luar, untuk itu perlu diperlukan usaha-usaha atau cara-cara pemeliharaan disiplin. Pengawasan camat yang dilakukan pada Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan kutipan Soelistriyo (2003:86) yang mengungkapkan teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan penjabaran kerangka pemikiran diatas maka berikut ini adalah gambaran kerangka pemikiran peran camat dalam pengawasan pegawai negeri sipil pada Kecamatan Medan Labuhan:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**